

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 107 TAHUN 2017

TENTANG
TIM BERACARA DALAM PERSIDANGAN MEWAKILI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses beracara pada gugatan yang melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pihak dalam persidangan diperlukan tim beracara;
- b. bahwa pelaksanaan tugas beracara dalam persidangan untuk bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan tugas tambahan Subbagian Hukum di luar dari tugas dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Beracara dalam Persidangan Mewakili Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM BERACARA DALAM PERSIDANGAN MEWAKILI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
- KESATU : Menunjuk PNS dan Non PNS yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Beracara dalam Persidangan Mewakili Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Kuasa Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- KEDUA : Tim Beracara dalam Persidangan Mewakili Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menangani dan menyelesaikan Perkara dalam persidangan;
 - b. menghadap di muka Pengadilan;
 - c. menghadiri seluruh acara persidangan;
 - d. menghadap Ketua Pengadilan, Majelis Hakim, Panitera dan pihak-pihak lain;
 - e. menerima dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di kepaniteraan atau bersangkutan dengan perkara, memberikan keterangan/penjelasan, mengadakan perdamaian;
 - f. membuat, menandatangani, mengesahkan dan mengajukan: eksepsi, segala permohonan, surat jawaban, gugatan rekonsvansi,

duplik, replik rekonvensi, bukti-bukti, kesimpulan, risalah banding dan memori/kontra memori banding, risalah kasasi, memori/kontra memori kasasi, segala rekes-rekes dan lain-lain surat yang diperlukan;

- g. mengajukan saksi/ahli, mengajukan pertanyaan kepada saksi/ahli, mengajukan dan mempelajari bukti-bukti;
- h. menolak saksi/ahli atau bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak lain;
- i. menyatakan banding, menyatakan kasasi dan meminta perkara agar diperiksa kembali dengan peninjauan kembali;
- j. mengambil segala tindakan jaminan, membuat dan menyuruh menjalankan segala perintah juru sita, pemberitahuan, panggilan-panggilan dan menghadiri pemberitahuan/teguran-teguran dari Pengadilan-pengadilan dan lain-lain;
- k. mengajukan atau mempertimbangkan usul penyelesaian perkara secara damai; dan
- l. melakukan segala tindakan yang dianggap penting dan berguna selaku Kuasa Hukum.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Beracara dalam Persidangan Mewakili Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- KEEMPAT** : Kepada pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Beracara dalam Persidangan Mewakili Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan pelaksanaan persidangan dan/atau pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab dalam Diktum KEDUA;
- KELIMA** : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak berlakunya keputusan ini sampai dengan berakhirnya Tahun 2017.
- KEENAM** : Nama-nama Tim Beracara dalam Persidangan Mewakili Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2017.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Agustus 2017

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

ttt

Agus Prabowo

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Pejabat Pembuat Komitmen Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP;
3. Bendahara Pengeluaran LKPP;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
 KEBIJAKAN PENGADAAN
 BARANG/JASA PEMERINTAH
 NOMOR 107 TAHUN 2017
 TENTANG TIM BERACARA DALAM
 PERSIDANGAN MEWAKILI LEMBAGA
 KEBIJAKAN PENGADAAN
 BARANG/JASA PEMERINTAH

NAMA TIM BERACARA DALAM PERSIDANGAN
 MEWAKILI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1.	Dr. Salusra Widya, MA NIP. 19610509 198812 1 001	Sekretaris Utama	Sekretariat Utama
2.	Dr. Robin Asad Suryo, M.A NIP. 19650809 199003 1 001	Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan	Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
3.	Sarah Sadiqa S.H., M.Sc NIP. 19700118 199603 2 002	Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi	Kedeputian Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi
4.	Ir. Dharma Nursani, M.Sc., Ph.D NIP. 19580307 198603 1 001	Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia	Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan
5.	Ir. Ikak Gayuh Patriastomo, MSP NIP. 19610408 199403 1 002	Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa
6.	R. Fendy Dharma Saputra, S.H., LL.M. NIP. 19660529 199201 1 001	Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
7.	Setya Budi Arijanta, S.H., KN. NIP. 19701231 199503 1 001	Direktur Penanganan Permasalahan Hukum	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
8.	Ir. Sutan Suangkupon Lubis, M.Sc. NIP. 19640323 199203 1 005	Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
9.	Emin Adhy Muhaemin, S.Si., M.Si. NIP. 19680325 199603 1 001	Direktur Pengembangan Sistem Katalog	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
10.	Raden Ari Widiyanto, S.H., M.E. NIP. 19690813 199703 1 001	Kepala Subdirektorat Barang dan Jasa	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
11.	Eko Rinaldo Octavianus, SE, M.E. NIP. 19691014 199603 1 001	Kepala Subdirektorat Riset dan Kontrak	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
12.	Rinaldi Morintoh, S.H., M.Kn NIP. 19810509 201012 1 001	Kepala Subbagian Hukum	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
13.	Mustika Rosalina Putri, S.H., M.H. NIP. 19841121 201012 2 001	Kepala Seksi Kontrak Payung	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
14.	Sari Melani, S.H. NIP. 19800224 201012 2 001	Kepala Seksi Penanganan Permasalahan Kontrak Pekerjaan konstruksi	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
15.	Desi Kartika, S.H. NIP. 19891212 201211 2 001	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum

16.	Inamawati Mastuti Dewi, S.H. NIP. 19900814 201402 2 001	Pranata Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
17.	Ichwan Fajar Harika, S.H. NIP. 19830310 201402 1 001	Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
18.	Muhammad Qadr Siddiq Zam, SH. NIP. 19840621 201402 1 001	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
19.	Dian Arsita Wardhani, S.H. NIP. 19840823 201502 2 001	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I
20.	Febri Kamalisa Rachman, S.H., M.H. NIP. 19840208 201502 2 001	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
21.	Ardian Hoppin Sitompul, S.H. NIP. 19880522 201502 1 001	Analisis Hukum	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
22.	Rasmita Juliana Sitepu, S.H., M.Kn NIP. 19880709 201502 2 001	Analisis Hukum	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
23.	Benny Leopold Dumais, S.H. NIP. 19890530 201502 1 001	Analisis Hukum	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
24.	Mahatmya Widyasari, S.H.	Staf Bagian Hukum	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
25.	Faraditha Utami Putri Sihite, S.H	Staf Perencanaan Pengadaan K/L/I	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evauasi
26.	Rayhan Maulana, S.H.	Staf Perencanaan Pengadaan K/L/I	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evauasi
27.	Zainal Abidin, S.H.	Staf Pengendalian Pelaksanaan Katalog	Direktorat Pengembangan Katalog
28.	Wisnu Dwihutomo, S.H.	Staf Pengendalian Pelaksanaan Katalog	Direktorat Pengembangan Katalog
29.	Siti Fathia Rizki Sarkuti, S.H.	Staf Pengendalian Pelaksanaan Katalog	Direktorat Pengembangan Katalog
30.	Afif Pramayuda, S.H.	Staf Pengendalian Pelaksanaan Katalog	Direktorat Pengembangan Katalog
31.	Erwin Syahroni, S.H.	Staf Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Pusat	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I
32.	Niko Muhamad Insani, S.H.	Staf Wilayah Maluku dan Papua	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
33.	Didi Nahtadi, S.H.	Staf Keterangan Ahli Barang dan Jasa	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

ttt

Agus Prabowo